

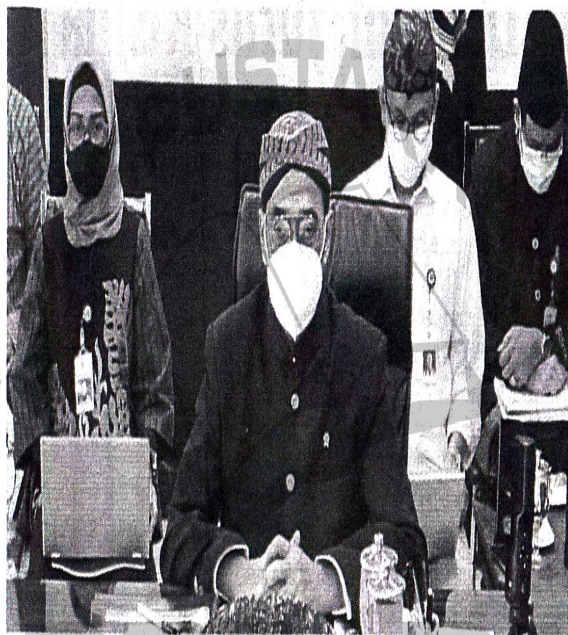
Judul : Dukong Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Dukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

JAKARTA-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Perhubungan Tahun 2021 merujuk pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disesuaikan. Yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Itu sesuai dengan arahan Presiden agar tema pembangunan pada tahun 2021 harus adaptif dan responsif terhadap percepatan penanganan COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, tema RKP tahun 2021 yaitu meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas.

"Yang kami lakukan selaras dengan kebijakan pemerintah yang mendorong adaptasi kebiasaan baru menuju recovery ekonomi nasional. Sehingga masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara produktif. Namun tetap aman dari COVID-19," jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6/2020).



RAPAT - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI tentang Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian dan Lembaga (RKPP) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB di sektor transportasi dimaknai sebagai cara baru bertransportasi. Dengan mengedepankan protokol kesehatan yang

harus dijalankan baik oleh penumpang, operator sarana dan prasarana transportasi. Mulai dari keberangkatan, dalam perjalanan, sampai kedatangan.

"Sehingga transportasi tidak hanya aman dan berkeselamatan. Tetapi juga memenuhi jaga jarak dan penerapan protokol kesehatan," jelas Budi Karya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam Rancangan RKP Tahun 2021 Kementerian Perhubungan diamanahkan untuk mewujudkan Proyek Prioritas Strategis.

Yaitu, pertama, pembangunan Infrastruktur Ekonomi seperti Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Pelabuhan Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Makassar, Bitung, dan Sorong); Kereta Api Makassar-Pare-Pare; Jembatan Udara 37 Rute di Papua. Kedua, pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkotaan yaitu mewujudkan Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar).

Adapun Kementerian Perhubungan mendapatkan Pagu Indikatif TA. 2021 sebesar Rp41,3 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 8 Mei 2020. (dai)